

Dua Motor Adu Banteng di Stadion Pakansari Cibinong

CIBINONG (IM)- Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Lingkar Dalam Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kejadian ini dua orang mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 03.00 WIB pagi tadi. Awalnya, motor Honda Beat dengan nomor polisi F 5855 FIO yang dikendarai DI melaju dari arah Laga Tangkas menuju Pintu Utara.

“Sewaktu sedang bergerak pada saat bersamaan datang motor Honda Scoopy F 6658 FI,” kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (17/5). Motor yang dikendarai

TO tersebut melawan arah bergerak lurus dari arah Pintu Utara menuju ke arah Laga Tangkas. Sehingga, kecelakaan adu banteng antara kedua motor tidak terhindarkan.

“Terjadi benturan di bagian bodi depan,” jelasnya.

Dalam kecelakaan ini, kedua pengendara mengalami luka berat. Pemotor DI luka pada bagian wajah, tangan kiri patah dan kaki kiri memar, sedangkan TO mengalami luka di wajah dan kedua kaki lecet.

“Korban dibawa ke RSUD Cibinong, kerugian materi sekitar Rp 10 juta,” pungkasnya. **gio**

APBD Kab. Bogor Tahun 2024 Masih Defisit Rp 400 Miliar

CIBINONG (IM)- Walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor di Tahun 2024 sebesar Rp 10 triliun, ternyata masih terjadi defisit atau lebih besar pengeluarannya ketimbang pendapatan hingga Rp 300 hingga 400 miliar.

Sementara itu, terhadap Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor ia hanya berharap ada efisiensi yang normal dalam pelelangan pengadaan barang jasa tersebut.

“Kami tak ingin menekan efisiensi tetapi malah mengurangi spesifikasi, karena nantinya bakal mengurangi usia pemakaian. Efisiensi yang baik adalah penawaran harga yang sewajarnya dan masih memenuhi unsur harga persatuan serta lainnya,” sambung Achmad Wildan.

Selain itu, tuturnya. BPKAD, terutama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) pun berupaya mendapatkan pendapatan tambahan untuk menutupi defisit.

“Kami berupaya meminta hak bagi hasil dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat Tahun 2023 yang tersisa dan meningkatkan pendapatan pajak seperti PBB, BPHTB, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran maupun lainnya termasuk dengan menagih piutang pajak,” tutur Achmad Wildan. **gio**

Mereka membekukan sejumlah anggaran studi bandung, kunjungan kerja, makan minum, pelatihan dan belanja barang yang bersifat elektronik atau E-katalog.

“Sementara ini, kami membekukan sementara anggaran studi bandung, kunjungan kerja, makan minum, pelatihan dan belanja barang E-katalog, hingga nanti ada pendapatan tambahan,” ujar Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan kepada wartawan, kemarin.

Walaupun besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor di Tahun 2024 sebesar Rp 10 triliun, ternyata masih terjadi defisit atau lebih besar

pengeluarannya ketimbang pendapatan hingga Rp 300 hingga 400 miliar.

Sementara itu, terhadap Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor ia hanya berharap ada efisiensi yang normal dalam pelelangan pengadaan barang jasa tersebut.

“Kami tak ingin menekan efisiensi tetapi malah mengurangi spesifikasi, karena nantinya bakal mengurangi usia pemakaian. Efisiensi yang baik adalah penawaran harga yang sewajarnya dan masih memenuhi unsur harga persatuan serta lainnya,” sambung Achmad Wildan.

Selain itu, tuturnya. BPKAD, terutama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) pun berupaya mendapatkan pendapatan tambahan untuk menutupi defisit.

“Kami berupaya meminta hak bagi hasil dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat Tahun 2023 yang tersisa dan meningkatkan pendapatan pajak seperti PBB, BPHTB, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran maupun lainnya termasuk dengan menagih piutang pajak,” tutur Achmad Wildan. **gio**

Walaupun besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor di Tahun 2024 sebesar Rp 10 triliun, ternyata masih terjadi defisit atau lebih besar

8 | Nusantara



PENCARIAN KORBAN BANJIR BANDANG HARI KETUJUH

Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (17/5). Sebanyak 500 personel petugas tim SAR gabungan yang terbagi dalam lima sektor melakukan pencarian terhadap 13 korban banjir bandang lahar dingin Marapi yang belum ditemukan pada hari ketujuh dengan menyisir sungai.

Sekda Jabar: TPPAS Lulut-Nambo Beroperasi Penuh di Bulan Juni

TPPAS Lulut-Nambo bakal melayani pengelolaan dan pemrosesan sampah Kota Depok, Kota Tangsel, Kota dan Kabupaten Bogor dengan jumlah tonase sampah 50 - 70 ton.

KLAPANUNGGAL

(IM)- Usai uji coba operasional, Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo akan beroperasi penuh di Bulan Juni mendatang.

“Usai uji coba ke lima atau terakhir dan keluar hasil evaluasinya, TPPAS Lulut-Nambo akan beroperasi penuh di Bulan Juni mendatang,” ucap Sekda

Jawa Barat, Herman Suryatman di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jumat (17/5).

Herman Suryatman menuturkan bahwa TPPAS Lulut-Nambo selanjutnya akan melayani pengelolaan dan pemrosesan sampah akan melayani empat pemerintahan daerah.

“TPPAS Lulut-Nambo bakal melayani pengelolaan dan pemrosesan sampah Kota Depok, Kota Tangsel, Kota dan Kabupaten Bogor dengan jumlah tonase

sampah 50 - 70 ton,” tutur Herman Suryatman.

Mantan Penjabat Bupati Sumedang ini berharap, dengan beroperasionalnya TPPAS Lulut-Nambo maka PT. Jabar Bersih Lestari (JBL) sebagai pengelola mendapatkan tipping fee dari empat pemerintah daerah tersebut.

“Walaupun ini bukan bisnis murni, tetapi investor kan harus meraih untung agar balik modal yang sudah ia tanam. Hingga wajar jika diberlakukan tip-

ping fee,” harapnya.

Pria berusia 54 tahun ini melanjutkan bisa saja, PT JBL menambah mesin pengelolaan sampahnya. Hal itu mempertimbangkan masih besarnya Gedung Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah.

“Bisa saja nanti ditambah mesinnya, nanti akan ada evaluasi karena mesin yang saat ini beroperasi ada batas waktu pemakaiannya dan saat ini kami akan efektifkan dulu,” lanjut Herman Suryatman. **gio**



AKSI BELA PALESTINA DI BANDUNG

Massa yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) melakukan aksi bela Palestina di Halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/5). Dalam aksinya, massa FPMI mengecam penjajahan yang terjadi di Palestina serta meminta agar pemimpin dari negara muslim untuk bersatu untuk melawan kekejaman Israel.

Pemkot Bandung Mulai Terapkan Hari Bebas Kendaraan di Balai Kota

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menerapkan Friday car free atau hari bebas kendaraan di setiap Jumat di lingkungan Balai Kota Bandung pada Jumat (17/5).

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kuswara menyebut, hari bebas kendaraan di setiap Jumat adalah program pemerintah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi.

“Ini adalah salah satu program pemerintah untuk masyarakat umum, bahwa aparat sipil negara (ASN) bisa menggunakan kendaraan transportasi umum,” kata Asep Kuswara, Jumat (17/5).

Program Friday car free, diturkannya juga sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung dan menekan tingkat polusi di kawasan balai kota. Sebagai gantinya, Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah transportasi umum untuk mengantarkan para ASN yang

berdinas di Balai Kota Bandung juga di kawasan pemukiman Jalan Cianjur. “Armada dan anggota kita siapkan. Titik nya ada di Terminal Cicaheum, Antapani, Leuwipanjang, Alun alun, Padjadjaran, Ledeng. Itu titik untuk ASN ke balai kota dan yang bekerja di Jalan Cianjur,” ucapnya.

Jumlah kendaraan yang disiapkan, dikemukakan Asep sebanyak 10 kendaraan. Pihaknya sendiri menyiapkan sebanyak lima kendaraan, dan dibantu oleh instansi lainnya untuk mendukung program tersebut.

Tak hanya itu, ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan memasuki area Balai Kota Bandung. Antara lain, undangan mengunjungi Puskesmas di Balai Kota Bandung. “Di kawasan Balai Kota Bandung ini, kita punya pelayanan Puskesmas. Ada yang sakit, dipersilahkan untuk kendaraannya masuk. Tapi kalau yang lain itu tidak diperbolehkan masuk balai kota,” ujar dia. **opur**

Jelang Idul Adha, Sleman Kekurangan Ribuan Ekor Ternak

SLEMAN (IM)- Menjelang Idul Adha, ketersediaan ternak di Kabupaten Sleman dipastikan tidak mencukupi. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Suparmono, Jumat (17/5), menjelaskan estimasi kebutuhan ternak kurban pada 2024 untuk Kabupaten Sleman sebanyak 9.600 ekor sapi, 12.100 ekor kambing, dan 2.700 ekor domba. “Sedangkan ketersediaannya sapi 3.892 ekor, kambing 126 ekor dan domba 1.468 ekor. Artinya, sesuai estimasi kami, sapi kurang 5.708 ekor, kambing kurang 11.974 ekor dan domba kurang 1.232 ekor,” kata Suparmono.

Meski begitu, lanjutnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada pemenuhan dari daerah lain yang dibawa masuk oleh kalangan pedagang ternak maupun panitia penyembelihan hewan kurban yang datang langsung ke daerah asal dan membawa masuk ke Sleman.

Untuk memastikan ternak kurban dalam kondisi sehat dan menghasilkan daging yang sehat, utuh, dan halal (asuh), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman juga mengintensifkan pemeriksaan baik di kandang-kandang kelompok maupun di pasar hewan dan di pedagang-pedagang yang membuka dadakan.

Pemantauan Kesehatan ternak terutama yang akan digunakan untuk kurban itu melibatkan petugas Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) yang tersebar di setiap kecamatan (kapanewon) dan tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa fisik hewan dan keterangan asal hewan. Ternak yang dijual di Pasar Hewan Kurban kambing atau domba, asal ternak lokal Kabupaten Sleman, Muntian, Magelang, Gunungkidul, Tembung, Wonosobo, dan Klaten. Kebanyakan pedagang sapi mendatangkan dari Kabupaten Sleman atau lokal, Gunungkidul, Kulonprogo, Magelang, dan Klaten. Selama beberapa tahun dilakukan pemantauan pasar hewan kurban secara rutin, namun belum pernah ditemukan adanya ternak sapi yang harus diafkir

karena penyakit hewan menular seperti penyakit Antraks.

Pada 2024, ujarnya, terjadi kasus penyakit Antraks di wilayah Gayamharjo Prambanan sehingga pengawasan ternak diperketat untuk menghindari penularan penyakit dan menjamin kesehatan baik pada hewan maupun manusianya guna persiapan penyembelihan pada saat kurban.

Beberapa penyakit lain yang sering ditemukan di pasar hewan, menurut Suparmono, adalah penyakit conjunctivitis, pink eye, ORF, dan scabies serta trauma pada saat transportasi.

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 1445 H/2024 M, situasi di pasar hewan Ambarketawang mengalami penurunan baik untuk ternak yang masuk maupun transaksi yang dilakukan di pasar hewan. Tahun lalu, 2023, ujarnya, titik penjualan sebanyak 359 titik dan petugas pemantauan hewan Qurban tahun 2023 sebanyak 252 orang.

Sementara hasil pemantauan pemotongan hewan Qurban tahun 2023, sapi 9.432 ekor, domba 12.003 ekor dan kambing 2.603 ekor. **opra**



BURSA KERJA DI KAMPUS IPB BOGOR

Sejumlah pencari kerja mencari informasi dalam IPB Job Fair 2024 di Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB University, Kab. Bogor, Jabar, Jumat (17/5). Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah pengangguran di Jabar, pada Februari 2024 sebanyak 1,79 juta orang atau turun 217.000 orang dibandingkan Februari 2023.

Pelaku Usaha Pariwisata di Jateng Keluhkan Larangan Study Tour Sekolah

SEMARANG (IM)- Larangan study tour untuk sekolah negeri di sejumlah wilayah dinilai akan berdampak pada destinasi dan transportasi wisata di Jawa Tengah (Jateng). Diperkirakan jumlah pengunjung akan merosot dan pelaku wisata harus mencari terobosan untuk tetap menghidupkan usaha kepariwisataan.

Keputusan larangan study tour dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah memang belum terlalu dirasakan para pelaku wisata saat ini. Namun dampak larangan tersebut diperkirakan akan mulai dirasakan dalam beberapa bulan ke depan dengan berkurangnya jumlah wisatawan dari kalangan pelajar yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata.

Pelaku usaha biro perjalanan di Kabupaten Semarang, Ariès mengungkapkan dampak larangan study tour itu cukup terasa karena beberapa jadwal rencana kegiatan wisata di sekolah SLTA negeri dibatalkan. “Ada rencana beberapa sekolah study tour ke Bali menggunakan armada kami dibatalkan akibat pelarangan itu,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Bambang, owner tempat wisata di Semarang bahwa meskipun saat ini belum berdampak pada kunjungan wisata. Namun adanya larangan tersebut cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya destinasi wisata yang menurun jumlah pelancong pelajar merosot tetapi juga usaha UMKM sekitar obyek wisata.

“Kita menolak larangan study tour bagi pelajar SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah, kita juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu,” kata Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Jawa Tengah, Setyo Legowo.

Atas keluarnya putusan itu, ungkap Setyo Legowo, ASPPI Jawa Tengah belum menanggapi sikap, meskipun dapat memahami maksud dari kebijakan Disdikbud Jawa Tengah yang melarang penyelenggaraan study tour di kalangan pelajar SMA

dan SMK negeri itu. “Menjadi pertanyaan pelarangan study tour, mengapa sekolah swasta boleh dan negeri tidak boleh,” tambahnya.

Larangan study tour itu, ujar Setyo Legowo, diperkirakan akan berdampak cukup besar bagi usaha kepariwisataan baik itu pendapatan destinasi wisata karena merosotnya pengunjung hingga biro travel. “Ketika tidak ada lagi siswa berwisata maka dampak teras sangat besar bagi biro tur, wisata sampai UMKM,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah sebelumnya menegaskan kembali larangan study tour bagi pelajar SMA dan SMK negeri di provinsi ini sebagaimana tertuang dalam nota dinas nomor 421.7/00371/SEK/III/2024, meskipun larangan tersebut sebenarnya telah ada sejak tahun 2020.

Penegasan kembali itu dilakukan setelah terjadinya kecelakaan rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang mengakibatkan 11 pelajar tewas. “Ada beberapa alasan penegasan kembali larangan study tour untuk sekolah negeri dibawah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Uswatun Hasanah. Alasan pertama study tour adalah untuk menekan berbagai macam pungutan di sekolah, karena dalam kegiatan piknik itu ada pungutan dan study tour pelancong pelajar merosot tetapi juga usaha UMKM sekitar obyek wisata.

“Kita menolak larangan study tour bagi pelajar SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah, kita juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu,” kata Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Jawa Tengah, Setyo Legowo. Atas keluarnya putusan itu, ungkap Setyo Legowo, ASPPI Jawa Tengah belum menanggapi sikap, meskipun dapat memahami maksud dari kebijakan Disdikbud Jawa Tengah yang melarang penyelenggaraan study tour di kalangan pelajar SMA